

PENYULUH AGAMA DAN ISU KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA PALU

RELIGIUS EDUCATOR AND THE ISSUE OF INTER-RELIGIOUS HARMONY IN PALU CITY

Saprillah

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. AP. Pettarani No. 72 Makassar
Email: pepilitbang@gmail.com

Naskah diterima tanggal 2 September 2016. Naskah direvisi tanggal 17 Oktober 2016. Naskah disetujui tanggal 9 November 2016

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan asumsi bahwa penyuluh agama memiliki peran strategis dalam pengelolaan isu keagamaan, termasuk kerukunan antar umat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran penyuluh agama dalam pengelolaan isu kerukunan antar umat beragama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada para penyuluh agama dan tokoh masyarakat. Lokasi penelitian di Kota Palu. Informan penelitian adalah penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Hindu, pengurus FKUB dan tokoh masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa penyuluh agama tidak memiliki program spesifik terkait dengan pengelolaan isu kerukunan. Isu kerukunan dikelola bersamaan dengan isu keagamaan lainnya yang bersifat normatif. Ketiadaan spesifikasi isu kerukunan lebih karena kinerja para penyuluh diukur berbasis pada tugas pokok dan fungsi penyuluh yang memang tidak memberi spesifikasi terhadap pengelolaan kerukunan. Meskipun begitu, para penyuluh agama di Kota Palu terlibat aktif dalam pengelolaan kerukunan dengan dua cara 1) terlibat sebagai pengurus FKUB Kota Palu yang memberi ruang lebar bagi penyuluh agama untuk berperan penting dalam pengelolaan kerukunan; 2) menginisiasi secara tematik isu kerukunan dalam setiap materi penyuluhan keagamaan yang diprogramkan secara rutin.

Kata Kunci: penyuluh agama, kerukunan, isu keagamaan normatif.

Abstract

This research based on the assumption that the religious educator had a strategic role in the management of religious issues including inter-religious harmony. This research aimed to describe the role of religious educators in the management of issues of inter-religious harmony. This research was qualitative research. Data were collected through interviews to the religious educator and public figure. Location of research was palu. Research informant were moslem educator, cristian educator, hindu educator, organizer of FKUP and public figure. This research found that every religiuos educator hadn't spesific program about the management of harmony issues. Harmony issues were managed with others normative religious issue. The absence of spesific harmony issue because the performance of educators was measured based on the duties and the functions which not given spesification about the management of harmony. Eventhough, religious educators in Palu actively involved in management of harmony with two ways 1) involved as organizer of FKUP of Palu which giving space to religiuos educators for playing an important role in management of harmony; 2) Initiating thematic issue of harmony in any religious counseling materials which programmed routinely.

Keywords: religious educator, harmony, normative religious issue.

PENDAHULUAN

Isu kerukunan menjadi isu penting sejak Negara Indonesia diproklamkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini karena

watak demografis Indonesia adalah multi etnik, multi agama, dan multi kultur (Ismail, 2012). Perdebatan tentang identitas keagamaan, khususnya Islam sebagai agama mayoritas, yang diusulkan sebagai identitas kebangsaan menjadi wacana yang

senantiasa mengiringi perjalanan bangsa Indonesia (Effendi, 2000.) Oleh karena itu, visi kerukunan menjadi salah satu visi utama di Kementerian Agama RI, sebagai perwakilan pemerintah dalam urusan keagamaan (lihat RPJMN 2015-2019).

Kerukunan menjadi hal yang utama untuk diperjuangkan dalam konteks kebangsaan. Riset Balai Litbang Agama (2011, 2012, 2013, dan 2014) di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa potensi kerukunan sangatlah besar. Masyarakat Indonesia secara umum toleran dan bisa menerima perbedaan khususnya pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Namun, pada aspek agama (baca: teologis) biasanya ada kehati-hatian dalam membangun relasi antar identitas agama.

Peran penyuluh menjadi penting dalam upaya membangun kerukunan. Problemanya adalah penyuluh memiliki kendala teknis dalam mengelola administrasi kepenyuluhan. Hasil riset Tim Balai Litbang Agama Makassar (2010) tentang penyuluh agama di kawasan Timur Indonesia menyimpulkan 1) Implementasi penyelenggaraan kepenyuluhan dari sisi sistem rekrutmen tenaga penyuluh berjalan relatif lambat. Penerimaan penyuluh fungsional tidak mencukupi kebutuhan penyelenggaraan kepenyuluhan. Sedangkan, pengangkatan tenaga penyuluh honorer telah cukup memadai. 2) Penyelenggaraan kepenyuluhan memiliki dua problem utama, yaitu problem struktural dan individual. Di tingkat struktural ketidakmandirian pengelolaan anggaran dan tidak adanya upaya peningkatan anggaran berdampak pada lemahnya pelaksanaan agenda kepenyuluhan di lapangan. Di tingkat individual, komitmen para penyuluh untuk mereposisi diri mereka sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan sangat lemah. Ini berimplikasi pada kurang kreatifnya dalam mengkonstruksi kelompok dampingan berdasarkan pada berbagai metode-metode pembelajaran. 3) Di mata masyarakat, para penyuluh terasa kurang populer. Masyarakat hanya tahu kalau para penyuluh itu sebagai guru ngaji atau dai. Ini berimplikasi pada berkurangnya fungsi kepenyuluhan khususnya pada fungsi konseling.

Tinjauan Pustaka

Walzer (1997) mengusulkan istilah toleransi aktif sebagai model toleransi yang paling ideal untuk masyarakat multikultural seperti Indonesia. Konsep toleransi (aktif) Walzer (1997) mencakup lima hal

yaitu 1) Menerima perbedaan untuk hidup damai, 2) menjadikan keseragaman menjadi perbedaan, 3) menerima bahwa orang lain memiliki hak, 4) mengekspresikan keterbukaan terhadap orang lain, ingin tahu, menghargai, ingin mendengarkan dan belajar dari yang lain, 5) dukungan yang penuh terhadap perbedaan dan menekankan aspek otonomi. Toleransi aktif Walzer setara dengan konsep pluralisme Toleransi aktif yang dimaksud dalam penelitian ini sesungguhnya adalah pluralisme. Diana L. Eck (2003) menyebutkan ada lima ciri khas pluralisme, yaitu: pertama, pluralisme berbeda dengan pluralitas. Ia adalah *the energetic engagement with diversity*, pergumulan yang energik (aktif) terhadap kepelbagaian. *Kedua*, pluralisme bukan (sekadar) toleransi, melainkan proses *active seeking of understanding across line of difference*, pencarian pemahaman yang aktif terhadap perbedaan. *Ketiga*, pluralisme bukan relativis melainkan *the encounter of commitment* (pergumulan komitmen). *Keempat*, pluralisme berbeda dengan sinkretisme. Pluralisme mengandaikan saling menghormati di atas basis saling menghargai perbedaan dan keunikan masing-masing tradisi agama. *Kelima*, pluralisme dibangun berdasarkan dialog (antar iman).

Penyuluh agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam hal kepenyuluhan agama menjadi elemen paling strategis dalam hal pengelolaan kerukunan. Penyuluh agama berada di level masyarakat sehingga lebih mudah mengetahui persoalan kemasyarakatan (KMA Nomor 516 Tahun 2003). Bahasa agama yang menjadi bahasa penyuluh memiliki muatan ajaran toleransi. Setiap agama memiliki unsur ajaran yang memuat ajaran-ajaran perdamaian (Harahap, 2011 dan Mizrawi, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara terhadap para penyuluh agama. Wawancara dilakukan di kantor KUA, kantor Kementerian Agama, dan lobi hotel. Beberapa narasumber bersedia melakukan pendalaman wawancara melalui telepon. Tema wawancara meliputi 1) program kerukunan yang dilakukan oleh para informan 2) pengelolaan kerukunan sebagai implementasi dari program kepenyuluhan yang dilakukan. Observasi penelitian dilakukan dengan mengamati metode dan model penyampaian pembahasan termasuk menyaksikan siaran dakwah atau kepenyuluhan agama melalui TVRI.

PEMBAHASAN

Membaca Situasi Kerukunan di Kota Palu

Sejak terjadinya tragedi Poso di tahun 2000-an, stigma Sulawesi Tengah berubah. Provinsi ini dianggap sebagai “ladang” dari terorisme di Indonesia. Masih aktifnya gerakan Santoso menyebabkan Sulawesi Tengah tetap menjadi daerah operasi intelejen. Palu, sebagai ibu kota provinsi memegang pintu utama. September tahun 2014 lalu, satu rumah kos yang diduga menjadi *fai* (pencari dana) kelompok Santoso tertangkap. Sedangkan, di Poso hampir setiap bulan terjadi friksi antara pihak keamanan dan pihak yang dianggap jaringan terorisme pimpinan Santoso.

Kasus Poso memang menjadi pengalaman traumatik bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Tidaklah mengherankan, apabila para tokoh agama, pemerintah, dan pihak keamanan memberi respon yang cepat terhadap kejadian Tolikara pada tanggal 19 Juli 2015 yang lalu. Mereka segera menggelar pertemuan yang menghimbau kepada seluruh tokoh agama untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan kejadian Tolikara. Pertemuan ini penting untuk dilakukan mengingat kasus Tolikara bisa membangkitkan memori warga (khususnya di Poso) tentang kasus yang tidak bisa terlupakan itu (Metro Sulawesi, 22/7/2015).

Akibat lain dari konflik Poso adalah muncul stigma yang buruk tentang Sulawesi Tengah. Orang-orang luar selalu menganggap Sulawesi Tengah sebagai kawasan yang menakutkan. Setidaknya ini dirasakan oleh Oksantianus (penyuluh Kristen). Dia pernah mengajak rombongan dari Provinsi Riau yang ikut pentas seni di Palu. Dalam pikiran mereka, Palu adalah kawasan yang menakutkan. Setelah datang beberapa hari, pikiran mereka berubah. Palu adalah kawasan yang indah dengan penduduk yang ramah.

Padahal, pengalaman kerukunan bagi Oksantianus bukanlah barang yang aneh. Dia berasal dari Suku Kulawi, salah satu suku lokal di Sulawesi Tengah. Suku Kulawi yang terasosiasi sebagai pemeluk Kristen dikenal sebagai suku yang terbuka. Proses kawin silang jamak terjadi. Oksantianus memiliki beberapa kerabat yang berbeda agama. Pergaulan dengan komunitas Arab yang ada di Palu pun dirasakannya sejak kecil. Dia akrab dengan seorang keluarga Arab yang anak-anaknya sering diinapkan di rumahnya apabila orang tuanya sedang keluar kota. Identitas agama tidak memengaruhi hubungannya dengan kelompok berbeda agama. Situasi ini tidak berubah

meski pernah terjadi tragedi Poso. Masyarakat cukup menyadari kalau tragedi Poso adalah tragedi yang bersifat politis dengan bungkus agama (Wawancara Oksantianus, Penyuluh Agama Kristen, 15/10/2015).

Pengalaman lain adalah pengalaman I Wayan Suidiana (Penyuluh Hindu). Kedatangan agama Hindu sejak tahun 1980-an di Palu berlangsung dengan damai. Warga Hindu yang kebanyakan transmigran diterima dengan baik oleh warga muslim yang ada di sekitarnya. Wayan Suidiana tidak pernah mendengar ada ketegangan antara umat Hindu dan agama lain, baik dalam skala individu apalagi dalam skala komunal. Bahkan sejak tiga tahun yang lalu, umat Hindu berinisiatif menggelar pawai Ogoh-Ogoh. Sebuah tradisi yang terkait dengan hari Nyepi. Pawai Ogoh-Ogoh tidak pernah dilakukan sebelumnya karena umat Hindu merasa khawatir terhadap kemungkinan adanya penolakan (wawancara, 15/10/2015).

Pengalaman Oksantianus dan Wayan Suidiana memang sangat personal tetapi bisa menjadi basis refleksi hubungan antar umat beragama di Kota Palu. Bahwa narasi agama dalam level yang sangat mikro dan personal sangat jarang dipertentangkan. Masing-masing kelompok menyadari dengan baik batasan-batasan yang tidak bisa saling dilanggar. Agama tidak menjadi penghalang untuk terjadinya kohesi sosial bahkan di tingkat yang paling personal, perkawinan beda agama.

Pola hubungan yang rukun dan damai ini tentu saja tidak terlepas dari model dan perspektif Islam yang dominan di Palu, yaitu model Islam moderat. Peran Pesantren Al-Khaerat menjadi penting disini. Pesantren yang didirikan oleh SIS Al-Jufri sebelum kemerdekaan sangat dominan memengaruhi wacana keislaman di Kota Palu (tanpa bermaksud mengabaikan peran NU, Muhammadiyah, dan DDI yang juga berkembang di Kota Palu). Sebagian besar ulama dan tokoh agama yang berpengaruh di Palu memiliki keterkaitan gen pengetahuan dengan Pesantren Al-Khaerat. Al-Khaerat menjadi simbol umat Islam di Palu. Setidaknya, ini terlihat dari program interfidei yang mendorong studi perdamaian bagi siswa di Kota Palu. Tiga sekolah yang dipilih menjadi pioner adalah SMA Al-Khaerat, SMA Katolik, dan SMA Kristen (Timo-Penyuluh Katolik, wawancara, 17/10/2015).

Nalar Islam moderat menjadi penting karena faktanya Islam adalah kelompok mayoritas di Palu. Data statistik menunjukkan 92% warga Palu memeluk Islam. Perspektif Islam moderat menjadi

payung bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Bisa dibayangkan kalau kelompok Islam dominan adalah kelompok intoleran, konflik Poso akan bisa sangat memengaruhi pola hubungan antar umat beragama, khususnya antara Islam-Kristen di Palu. Ini bisa dilihat pasca konflik Poso, beberapa percobaan dilakukan oleh kelompok jaringan (yang disebut) teroris untuk memancing suasana keruh di Palu. Seorang pendeta ditembak (2003), bom diledakkan di gereja dan Pasar Maesa (2011). Tindakan ini tidak pula memengaruhi terbentuknya milisi sipil di kalangan muslim Palu seperti yang terjadi di Poso. Apa artinya? Masyarakat Palu memiliki lapisan kesadaran agama yang damai, sebagaimana tipikal masyarakat Indonesia secara umum. Kesadaran yang terbentuk selama bertahun-tahun. Bagi umat Islam Palu, model keislaman moderat yang direproduksi oleh Pesantren Al-Khaerat cukup ampuh membentuk perilaku keagamaan yang berorientasi damai. Artinya lainnya adalah konflik agama seperti Poso sangat jelas digerakkan oleh kelompok “luar” entah untuk kepentingan tertentu dengan menjadikan agama sebagai arena pertarungan.

Di lain sisi, segala bentuk percobaan teror ini juga tidak memengaruhi kelompok Kristen untuk melakukan tindak radikal yang serupa. Diakui oleh Martinus, penembakan seorang pendeta yang sedang berkhotbah adalah peristiwa yang menyakitkan bagi umat Kristen. Tetapi, umat Kristen Palu menyadari dengan baik bahwa kejadian itu adalah bentuk teror yang bermaksud memancing mereka. Mereka menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Mereka juga menyadari sebagai kelompok minoritas tidak bisa melakukan tindakan yang over (Martinus-kasi penyelenggara bimas Kristen Kota Palu, wawancara, 18/10/2015).

Meski terkategori rukun tetapi tidak berarti Kota Palu lepas dari problem relasi, khususnya dalam konteks relasi mayoritas-minoritas. Bias mayoritas tetap terlihat dalam kasus pendirian rumah ibadah. Data FKUB setidaknya menunjukkan ada dua kasus berkaitan dengan rumah ibadah yang muncul dalam setahun terakhir. Rumah ibadah Saksi Yehova dan Gereja Pantekosta. Kasus rumah ibadah saksi Yehova sejauh ini masih menggantung.

Kasus ini mulai muncul setelah beberapa orang warga (muslim) yang semula memberi dukungan/tanda tangan (sesuai dengan PBM No. 9 dan 8 tahun 2006) tiba-tiba menarik dukungan. Gereja itu pun akhirnya batal didirikan. Sementara Gereja Pantekosta mendapat penolakan warga atas

pemasangan plang “gereja” di sebuah bangunan yang sejak puluhan tahun sudah dijadikan sebagai “tempat ibadah”. Warga mengirim surat protes ke pihak terkait (Kepolisian, Kemenag, dan FKUB). Atas dasar surat itu, pihak FKUB menyarankan penurunan plang itu (wawancara Ismail Pangeran, ketua FKUB Kota Palu). Sebelumnya, ada kasus penolakan warga terhadap pembangunan gereja di Jalan Kijang. Penolakan ini sempat berujung rusuh dengan terjadinya kontak fisik (Zulfiah-penyuluh agama Islam, wawancara, 17/10/2015).

Problem lain adalah terkait dengan relasi internal. Khususnya dalam Islam dan Kristen. Sudah jamak diketahui, kedua agama ini memiliki dinamika yang sangat tinggi. Dalam Islam, geliat kelompok-kelompok baru terjadi dimana-mana. Kelompok-kelompok yang mengusung wacana Islamis seperti, FPI, HTI dan Wahda Islamiyah sudah mulai berkembang di Palu. Kelompok yang mengusung wacana parsial seperti Ahmadiyah. Bahkan kelompok lokal seperti Madi pun muncul. Salah satu aksi FPI di Palu adalah demonstrasi penolakan Ariel (Noah) untuk tampil di Palu walau tiket sudah terjual habis. Kemunculan Ahmadiyah juga sudah mendapat respon. Beberapa orang pemuda mengatasnamakan organisasi tertentu melakukan intimidasi kepada anggota Jamaat Ahmadiyah pada tahun 2011 lalu (Hernia dan Hader-Penyuluh Islam, wawancara, 20/10/2015).

Begitu pula, dalam masyarakat Kristen Palu. Perkembangan kelompok Karismatik cukup pesat. Hingga saat ini, ada 29 kelompok Kristen yang belum mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) gereja. Sebagian besar diantara mereka beraliran karismatik. Karakteristik aliran Karismatik adalah tertutup. Mereka abai terhadap keterbukaan dan lebih cenderung menutup diri dari pergaulan yang lebih luas. Cara beribadah mereka ekspresif. Seorang guru Karismatik pernah bermasalah dengan pihak yayasan akibat dari salah paham soal ibadah. Gereja Pentakosta pun bermasalah dengan masyarakat sekitar. Dalam perspektif Martinus, pemasangan *plang* gereja di rumah yang digunakan beribadah menunjukkan bahwa kelompok Karismatik tidak sanggup beradaptasi dengan warga sekitar. Selain karismatik, kehadiran Saksi Yehova di Palu pun menimbulkan masalah. Pola “dakwah” Saksi Yehova yang door to door telah “meresahkan” sejumlah warga Kristen. Protes pun sudah dilayangkan ke Kementerian Agama. Dalam perspektif Kristen, saksi Yehova bukanlah bagian dari denominasi Kristen tetapi negara “meletakkan” Saksi Yehova

sebagai bagian dari negara. Hal ini mengganggu pola hubungan “internal” masyarakat beragama Kristen (Martinus, wawancara, 21/10/2015).

Problem lain menyangkut relasi sosial (tetapi di luar konteks agama) adalah perkelahian antar kampung yang sering terjadi di pinggiran kota Palu. Khususnya, kampung Nunu –Tavanjuka dan kelurahan Lere-Kelurahan Baru. Setiap tahun, selalu terjadi perkelahian dengan motif yang sepele. Perkelahian antar warga ini agak rumit menempatkannya dalam konteks agama dan suku karena keduanya beragama Islam dan beberapa di antaranya memiliki relasi kekerabatan, dekat dan jauh. Tahmidi, seorang pengamat sosial dari Untad (Universitas Tadulako) menjelaskan bahwa perkelahian antar kampung yang kerap terjadi adalah bentuk kegagalan dari pemerintah untuk menyediakan sumber daya ekonomi yang memadai bagi warganya. Pembangunan yang menggeliat tidak banyak melibatkan sumber daya lokal. Akibatnya pengangguran dari warga lokal semakin meningkat. Hal ini bisa memicu munculnya semacam psikologi kepanikan yang memudahkan terjadinya gesekan sosial.

Cerita intoleransi dalam skala yang kecil ini memang kerap menjadi duri dalam daging kerukunan. Bias mayoritas menyebabkan fungsi perlindungan dan pengayoman berubah menjadi tirani, penghalang dan kesemena-menaan. Sang mayoritas tidak menghendaki kemunculan kelompok minoritas dalam skala yang lebih massif. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa kerja kerukunan tidak hanya bisa diletakkan dalam realitas sejarah tetapi harus terus menerus dikelola. Perkembangan sosial yang semakin bergerak maju memungkinkan terjadinya pergeseran representasi terhadap kerukunan. Para pengungsi Poso atau kerabatnya yang meninggal akibat konflik itu tentunya memiliki pergeseran perspektif terhadap relasi agama. Penetrasi kelompok (yang disebut) teroris pun tidak pernah berhenti memengaruhi publik untuk ikut terlibat dalam gerakan mereka. Tertangkapnya tiga orang warga Palu bersama 4 orang WNI asal Turki pada September 2014 lalu mengindikasikan dengan baik akan hal itu.

Penduduk Kota Palu memang mayoritas beragama Islam. Tetapi, beberapa tempat dikenal sebagai basis penduduk Kristen. Seperti di wilayah Maesa (dulu bahkan ada pasar babi di wilayah ini) dan Birobuli. Jumlah gereja dan pemukiman warga beragama Kristen cukup besar di sini. Artinya, potensi terjadinya friksi di titik wilayah ini sangat

memungkinkan terjadi. Pasca perang Poso, wilayah ini menjadi sasaran kelompok ekstrimis untuk memancing kekisruhan di Kota Palu.

Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Palu sangat melimpah. Nilai lokal seperti *nosabatutu* (bersaudara dan bersatu) dan *sintuwu maroso* yang mengedepankan nilai persaudaraan terlihat nyata dari penerimaan warga lokal terhadap kaum pendatang. Warga Bugis, Jawa, Arab, dan sebagainya dapat hidup bersama dengan warga Kaili dan Kulawi. Saling-silang perkawinan terjadi dan membentuk komunitas bersama sebagai warga Palu. Kehadiran Al-Khaerat sebagai penyangga dari sisi agama tentu juga menjadi modal sosial yang sangat penting. Begitu pula umat Kristen yang mayoritas adalah GPID (Gereja Protestan Indonesia Donggala) yang mengedepankan ajaran harmoni, termasuk juga umat lain yang hidup dan mengembangkan sistem nilai yang memudahkan terjadinya kohesi sosial.

Akan tetapi, semua modal sosial ini tidak punya kekuatan apabila diletakkan begitu saja tanpa dikelola. Kerukunan harus terus menerus dipelihara dalam berbagai level. Baik dalam bentuk yang artifisial seperti pertemuan simbolik antar pemimpin agama melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) maupun yang substansial yaitu membangun masyarakat yang bersedia untuk hidup berdampingan. Karenanya isu pembangunan rumah ibadah harus diletakkan secara proporsional. Masyarakat Islam yang mayoritas harus memahami lebih baik lagi soal kebutuhan ibadah umat Kristen yang setiap hari terus bertumbuh. Pun, masyarakat Kristen harus lebih bijak dalam hal pembangunan gereja ini. Kementerian Agama melalui penyuluh, FKUB, dan organisasi keagamaan perlu terus menerus melakukan penyadaran terhadap pentingnya dialog untuk menjembatani setiap kepentingan yang saling berbenturan.

Sejauh ini pengelolaan kerukunan memang cenderung lebih banyak di level tokoh agama, bukan di masyarakat. Para tokoh agama terbiasa melakukan komunikasi lintas iman. Tentu hal ini penting. Bagaimana pun juga tokoh memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas. Peran tokoh sekaliber KH. S. Saggaf Al-Djufri sangat penting misalnya tentu sangat penting. Sikap tegas dan kearifan yang dimiliki menjadi anutan dan panutan masyarakat Palu. Fatwa beliau yang menyatakan bahwa dibalik konflik Nunu-Tavanjuka ada peran aparat kepolisian bisa menjadi *shock therapy*. Entah karena perkataan itu atau bukan,

konflik sosial antar dua kampung itu sudah tidak pernah lagi terjadi sejak tahun 2015 ini (H. Irwan-Pembimas Islam, wawancara, 20/10/2015).

Akan tetapi, komunikasi lintas iman di tingkat rakyat juga sangat penting untuk dilakukan. Pertarungan sosial yang sesungguhnya terjadi di tingkat rakyat bukan di tingkat elit. Persepsi rakyat sangat memengaruhi situasi kerukunan. Logikanya sederhana. Yang berkelahi dan berkonflik adalah rakyat umum bukan elit. Sebagai contoh kasus Gereja di jalan Kijang Palu. Warga di sekitar sana menolak pembangunan gereja dengan mendasarkan argumennya pada “amanat leluhur”; *kami boleh bergaul, kami boleh bertetangga dengan Kristen tetapi tidak boleh ada gereja di wilayah kami* (wawancara Z). Argumen budaya ini tentu saja *absurd*, karena gereja dan rumah ibadah umat lain yang berdiri sejak lama sudah sangat banyak di Kota Palu. Di sekitar jalan itu pun sudah ada gereja. Artinya, ada persoalan komunikasi antar iman dan antar budaya yang tidak jalan. Reproduksi “amanat leluhur” sejatinya hanyalah permainan semantik untuk membenarkan tindakan penolakan itu. Disinilah pentingnya membangun dialog dan kesepahaman antar lintas iman di tingkat rakyat.

Mengapa dialog dan kesepahaman penting? Mari ambil contoh lain seperti kasus ibadah Jumat di salah satu SMK swasta di Palu yang disebut di atas. Seorang guru beragama Kristen diangkat menjadi guru untuk mengajar agama kepada siswa beragama Kristen. Sang guru kemudian melaksanakan semacam peribadatan setiap hari Jumat. Pihak Yayasan (yang beragama Islam) melarang pelaksanaan ibadah bertepatan di hari Jumat karena tidak jauh dari sana ada sebuah masjid. Sang guru bersikukuh karena merasa tidak mengganggu. Pintu kelas ditutup hingga akses suara tidak terlalu terdengar keluar. Pihak yayasan tidak menerima dan akhirnya sang guru dikeluarkan (diolah dari hasil wawancara dengan Oksantianus).

Kasus ini adalah contoh dari buruknya sebuah relasi antar identitas keagamaan yang tanpa dialog dan kesepahaman. Ketegangan yang tidak menemukan resolusi akhirnya berujung pada dominasi-subordinasi. Pihak yayasan yang merasa sebagai pemilik merasa berhak untuk mengatur pengelolaan agama di sekolahnya. Guru Kristen yang tidak mau mengikuti “perintah” dan aturan dari sekolah akhirnya dikeluarkan. Problem relasi di atas adalah tidak ada dialog dan kesepahaman. Kedua kubu ingin “memenangkan” pertarungan dengan memproduksi alasan masing-masing.

Pihak yayasan mengklaim ibadah di hari Jumat “mengganggu” kesucian hari Jumat dan pihak guru merasa tidak mengganggu karena area ibadah ditutup. Jalan keluar yang ditawarkan adalah ibadah Jumat dipindahkan ke hari lain. Ini tidak disetujui karena sang guru hanya punya waktu di hari Jumat untuk sekolah ini. Usulan lain untuk memindahkan ibadah Jumat di gereja dekat sekolah juga tidak bisa dituruti karena sang guru berasal dari gereja yang berbeda. Sementara pihak yayasan merasa bahwa ibadah di hari Jumat tidak elok dilakukan. Akibatnya, pemecatan menjadi resolusinya.

Kasus ini tidak akan berujung pemecatan apabila dialog dan kesepahaman diambil. Pihak yayasan seharusnya bisa memahami kesulitan sang guru yang tidak punya waktu melaksanakan kelas ibadah selain Jumat. Sang guru tidaklah melakukan kesengajaan untuk merusak “kesucian” hari Jumat. Dia menyadari dengan baik kalau hari Jumat itu hari yang suci bagi umat Islam. Karenanya, kelas ibadah ditutup rapat agar suara “nyanyian” tidak keluar. Tentu sangat indah, apabila di tengah lingkungan Islam, seorang Kristen bebas menjalankan agamanya. Afiliasi denominasi sang guru yang karismatik seharusnya juga bisa dipahami dengan baik. Pola ritual yang heboh adalah bentuk “alami” dari tradisi ritual denominasi Karismatik.

Sebaliknya, sang guru seharusnya bisa memahami posisinya sebagai kelompok minoritas. “Tidak menabrak tembok” (istilah Oksantianus). Pihak sekolah tidaklah melarang praktik ibadah bagi siswa. Yayasan sudah sangat moderat dengan mengizinkan seorang guru Kristen mengajar agama di sekolahnya. Yang diinginkan oleh sekolah adalah “jangan melaksanakan kelas ibadah di hari Jumat”. Sekolah sudah menawarkan hari lain. Pihak Kementerian Agama (melalui penyuluh) sudah menawarkan tempat lain (gereja) yang tidak jauh dari sekolah. Identitas “teologis” sang Guru yang Karismatik menjadi problem tersendiri. Liturgi Karismatik yang heboh dan ramai memang memudahkan munculnya “ketidaksenangan” dan atas identitas itu, sang guru tidak bebas melakukan di gereja lain. Sekali lagi, pemecatan tidak seharusnya terjadi jika kedua pihak bisa saling memahami dan saling berdialog.

Kasus guru ini tidak jauh berbeda dengan kasus Gereja Pentakosta di atas. Pemasangan plang gereja seharusnya bisa dipahami lebih bijak oleh masyarakat muslim setempat. *Tokh*, rumah itu memang sudah berfungsi sebagai “gereja” selama puluhan tahun. Anggota jemaat gereja itu sudah

lama melakukan ritual di rumah itu. Fungsi gereja sudah terjadi. Kalaupun mereka memasang papan nama Gereja, itu hanya ekspresi dari ritualitas yang sudah lama dilakukan. Sebaliknya, pihak Pentakosta seharusnya lebih peka. Pemasangan plang gereja sungguh tidak bijak karena bagaimana pun juga rumah itu adalah rumah bukan gereja. Meskipun, tanpa plang itu mereka tetap bisa melakukan ibadah sebagaimana yang mereka lakukan selama puluhan tahun. Kekisruhan ini tidak perlu terjadi jika kedua pihak saling memahami dan tahu diri.

Untuk kasus kesepahaman dan “tahu diri” ada baiknya belajar pada komunitas Hindu di Palu. Umat Hindu tahu cara beradaptasi dengan baik. Mereka tidak *ujug-ujug* memaksakan ritual yang demonstratif. Mereka lebih memilih melihat situasi yang terbaik. Festival ogoh-ogoh yang merupakan bagian yang cukup penting dalam ritual Nyepi sebagai simbol kemenangan terhadap kejahatan tidak langsung dilaksanakan di Palu. Komunitas Hindu menunggu hingga 20 tahun lebih untuk melakukannya. Setelah mereka yakin dengan baik bahwa masyarakat Islam bisa menerima. Eforia reformasi 98 yang membuka kran kebebasan di Indonesia tidak serta merta dijadikan sebagai momentum. Mereka sabar dan menunggu saat yang tepat. Tahun 2012, merupakan tahun pertama mereka melaksanakan festival ogoh-ogoh di Palu. Sambutan warga sangat antusias. Patung ogoh-ogoh menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar. *Mereka menjadikan ritual kami sebagai hiburan, bagi kami tidak ada masalah.* Sejak itu, festival Ogoh-Ogoh setiap tahun dilaksanakan sampai sekarang. Sebaliknya, warga Hindu Bali tidak merasa terganggu dengan tradisi masyarakat muslim yang memotong sapi di setiap hari Qurban. Bahkan, beberapa orang Hindu Bali ikut terlibat dalam “pesta” pemotongan Sapi (wawancara Wayan Sudiana, 19/10/2015).

Fenomena kerukunan umat beragama yang digambarkan di atas mengkonfirmasi hasil riset Balai Litbang Agama Makassar tahun 2010-2014 di enam provinsi yaitu Sulawesi Selatan (2010), Sulawesi Tengah (2010), Sulawesi Utara (2011), Kalimantan Timur (2012), Gorontalo dan Sulawesi Barat (2013), serta Sulawesi Tenggara (2014). Temuan riset mengindikasikan hal yang sama. Kerukunan di tingkat rakyat berada dalam level toleransi pasif. Level toleransi yang memberi ruang pada perbedaan tetapi memperkecil kemungkinan untuk ‘terlibat aktif’ dalam ruang dialog apalagi dalam level yang bersifat teologis (seperti rumah

ibadah). Model toleransi seperti ini menyimpan ‘jarak dan kecurigaan’ terhadap kelompok lain sekaligus juga menyimpan potensi untuk ‘menerima’. Karenanya, bisa bergerak ke arah positif dan juga ke arah negatif tergantung pada patronnya. Model toleransi pasif sangat dipengaruhi oleh tokoh agama dan peran pemerintah. Kekisruhan antar kelompok seperti Ambon, Poso, dan Tolikara adalah bentuk dimana toleransi pasif berubah menjadi intoleransi. Perluasan skala intoleransi menjadi konflik dipengaruhi oleh elit yang bermain di sana. Tokoh elit yang dimaksud disini bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah setempat. Jika menggunakan teori ini, maka Palu tidak terseret dalam arus konflik Poso (meski ada pancingan mengarah kesana) lebih karena patron (tokoh agama Islam dan Kristen) bijak dan memilih untuk mengambil jalan damai. Tentu berbeda, jika kasus penembakan pendeta disahuti keras oleh tokoh agama Kristen lainnya atau disahuti oleh tokoh Islam dengan cara yang keras pula.

Penyuluh Agama dan Pengembangan Wacana Kerukunan

Berdasarkan data Kemenag Kota Palu, jumlah penyuluh PNS sebanyak 9 orang. Sedangkan jumlah PNS non PNS sebanyak 415 orang. Melekatkan kata kerukunan dengan penyuluh memang agak problematik. Mengingat tugas dan pokok penyuluh tidak terkait langsung dengan isu ini. Tetapi, melepaskan isu kerukunan dari tugas kepenyuluhan lebih problematik mengingat isu kerukunan adalah dimensi yang sangat terkait dengan ajaran agama. Setiap agama mengajarkan kasih sayang, kepedulian, dan penghargaan terhadap sesama manusia baik se-agama maupun tidak. Para penyuluh agama memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ajaran agama yang damai menjadi fondasi bagi setiap masyarakat beragama.

Penyuluh agama di Kota Palu sebagian besar sangat dekat dengan isu kerukunan. Pada tahun 2006, para penyuluh agama terlibat sebagai pengurus FKUB. Pihak kementerian agama memandatkan para penyuluh untuk menjadi pengurus FKUB dan menempati posisi yang cukup baik. Sayangnya, pada kepengurusan FKUB sekarang (2012-2017) beberapa orang penyuluh agama Islam diganti. Penyuluh agama Hindu masih menjadi bagian dari FKUB. Kehadiran para penyuluh sebagai anggota FKUB memiliki dampak pada perspektif mereka terhadap kerukunan. Perhatikan wawancara berikut ini:

Dulu FKUB melibatkan penyuluh karena sebagai bagian dari Kementerian Agama, bisa memudahkan komunikasi dalam hal administrasi pengurusan rumah ibadah. Di Kementerian Agama, orang yang paling tahu berkaitan dengan hal begini kan penyuluh karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya menjadi pengurus FKUB sebelum menjadi penyuluh. Ketika terangkat menjadi penyuluh itu memperkuat tugas-tugas saya. Dengan permasalahan yang kita dapatkan di FKUB, kita punya tugas di masyarakat bagaimana memperkuat toleransi ini (I Wayan Sudiana, wawancara, 19/10/2015).

Kehadiran para penyuluh sebagai bagian dari FKUB memang tidak *an sich* terkait dengan status mereka sebagai penyuluh agama tetapi sebagai “perwakilan” Kementerian Agama di FKUB. Secara statuta, hal ini sebenarnya tidak benar. FKUB adalah organisasi masyarakat sebisa mungkin tidak melibatkan PNS dalam kepengurusannya. Tentu bisa dimaklumi, karena di daerah seperti Palu, sebagian besar sumber daya manusia yang punya kualitas baik adalah Pegawai Negeri Sipil. Pelibatan penyuluh sebagai anggota FKUB adalah refleksi dari posisi penyuluh yang ‘dekat’ dengan masyarakat. Program kepenyuluhan secara eksplisit bersentuhan langsung dengan problematika warga. Kehadiran mereka sebagai ‘perwakilan’ Kementerian Agama bisa mempermudah proses penyelesaian kasus yang terjadi setidaknya dari sudut pandang administrasi.

Efek balik bagi penyuluh, berdasarkan wawancara di atas adalah penyuluh memiliki pengalaman yang riil soal relasi antar umat beragama. Sebagai anggota FKUB, penyuluh berhadapan dengan kasus penolakan rumah ibadah (sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya) dan kasus lain. Hal ini membantu para penyuluh untuk memperluas perspektif kerukunannya dan menjadikannya sebagai bahan atau materi ajar dalam tugas kepenyuluhan.

Selain sebagai pengurus atau mantan pengurus FKUB, visi kerukunan para penyuluh agama juga dipengaruhi oleh latar belakang keorganisasiannya. 9 orang penyuluh agama Islam berstatus PNS berasal dari ormas Al-Khaerat (5 orang), NU (1 orang), DDI (1 orang), dan Muhammadiyah (2 orang). Organisasi-organisasi ini cukup menjadi indikator kalau penyuluh agama Islam memiliki perspektif keagamaan yang moderat dan terbuka.

Begitu pula dengan penyuluh non PNS. Sebagian besar penyuluh Non PNS direkrut dari

tokoh agama yang selama ini sudah bekerja sebagai muballigh, dai, guru mengaji, dan pengelola masjid dijadikan sebagai penyuluh PNS. Ulama karismatik sekaliber Said Saggaf, Sa’diyah Al-Jufri dan Khadijah Toana pun terdaftar sebagai penyuluh agama Kota Palu jalur non-PNS. Pihak Kementerian Agama meyakini bahwa seluruh penyuluh Non PNS yang berjumlah 400 orang memiliki latar belakang Islam moderat. Yang dimaksud adalah para penyuluh berasal dari Al-Khaerat, NU, Muhammadiyah, dan DDI. Seorang dai dari organisasi LDII pun terdaftar sebagai penyuluh agama Islam. Seluruh organisasi ini dikenal sebagai organisasi moderat dan menjadi sendi pembangunan Islam moderat di Indonesia.

Walau dekat dengan isu kerukunan, tidak berarti para penyuluh benar-benar memiliki sikap yang terbuka terhadap perbedaan. Misalnya dalam kasus natal. Ada penyuluh yang memahami bahwa mengucapkan selamat natal tidak boleh dilakukan. Mengucapkan selamat natal adalah bagian dari sikap teologis yang ‘terlarang’ bagi umat Islam. Namun ada pula penyuluh yang tidak mempermasalahkan ‘pengucapan’ selamat natal itu (Wawancara dengan Z, penyuluh agama Islam 22/10/2015). Artinya, perspektif kerukunan yang dimiliki oleh para penyuluh agama Islam di kota merefleksikan perspektif kerukunan masyarakat Palu secara umum. Perspektif kerukunan yang berada dalam tataran kerukunan yang pasif.

Hal ini diperkuat dengan pengakuan seorang penyuluh agama Islam yang menyatakan bahwa dia pernah ‘menghalangi’ tiga gereja berdiri di Kota Palu (ketika menjadi anggota FKUB). Ini dilakukan memang dalam rangka untuk mencegah terjadinya kisruh sosial. Misalnya izin salah satu gereja di Maesa. Di wilayah itu sudah berdiri beberapa gereja dari denominasi yang sama. Pendirian gereja baru akan bisa memunculkan gejolak dari warga sekitar. Karena itu sang penyuluh yang juga menjadi pengurus FKUB merasa perlu untuk tidak memberi izin pembangunan gereja. Perspektif yang digunakan oleh sang penyuluh adalah perspektif mayoritas. ‘Perlindungan’ terhadap kepentingan mayoritas menjadi pertimbangan utama ketimbang kepentingan beribadah kelompok minoritas. Ini menunjukkan bahwa bias mayoritas memang tidak bisa dilepaskan dari sang penyuluh. Padahal, negara sudah mengeluarkan PBM No 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Seharusnya, pertimbangan pendirian rumah ibadah mengacu kepada peraturan itu agar tidak terkesan mengalami bias kepentingan berbasis ideologi.

Penyuluh agama Kristen berjumlah 1 orang. Dia berasal dari jemaat GPID (Gereja Protestan Indonesia Donggala). GPID merupakan gereja yang paling dominan di Kota Palu. Gereja Protestan dikenal sebagai gereja yang terbuka. Perspektif relasi pun lebih mengedepankan harmonisasi ketimbang konflik. Contoh penembakan pendeta di Kota Palu pasca konflik Poso yang tidak disikapi berlebihan dan ekspresif oleh GPID adalah refleksi dari pilihan relasi harmonis tadi. Refleksi sebagai jemaat GPID mempengaruhi perspektif kerukunan. Ada kalimat menarik dari penyuluh Kristen yang bisa menjadi ukuran dari perspektif kerukunan. Kalimat yang dimaksud yaitu *“Jika kamu hendak menjadikan kerajaan Allah di muka bumi, kamu harus pastikan bahwa orang-orang beragama lain bisa tenang menerimanya”*. Kalimat filosofis Sang penyuluh Kristen ini sangat menarik. Ini sarat makna multikulturalisme. Kerajaan Allah yang akan dihadirkan harus memberi ketentraman kepada umat lain di sekitarnya. Ke-kristen-an yang dipahami bukanlah untuk menyingkirkan kelompok lain tetapi untuk memberi “kenyamanan” bagi orang lain termasuk kelompok yang berbeda agama.

Selain karena pengaruh dari keanggotaan GPID, wawasan kerukunan yang dimiliki oleh penyuluh Kristen ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya di STT Manado. Menurut si penyuluh, pergulatan terhadap teks-teks injil yang terbuka terhadap realitas sosial yang beragam telah dipelajari di STT. Mereka terbiasa melakukan studi antarteks dan perbandingan yang mengarahkan kepada mahasiswa untuk terbuka terhadap kepelbagaian. Faktor lain adalah faktor kultural. Penyuluh ini berlatar belakang suku Kulawi. Salah satu suku “asli” di Sulawesi Tengah. Suku Kulawi terkenal sebagai suku yang terbuka. Pengalaman hidup bersama dengan orang Islam sudah dialami sejak lama (sebagaimana yang dicontohkan pada bagian awal). Kawin silang antar agama di suku Kulawi sangat jamak terjadi. Hal ini pada gilirannya membentuk perspektif kerukunan yang baik bagi orang Kulawi, termasuk sang penyuluh (Oksantianus, wawancara, 15/10/2015).

Tak jauh berbeda tentunya dengan penyuluh agama Hindu (satu orang). Sebagai bagian dari Hindu mainstream (Siwa Sedante) dan sebagai pengurus FKUB, sangat mudah untuk menduga kalau si penyuluh memiliki wawasan kerukunan yang baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, komunitas Hindu di

Palu memiliki tingkat adaptasi yang baik. Mereka mudah bergaul dengan masyarakat muslim. Ajaran Hindu (dharma) yang mengedepankan harmonisasi dan keselarasan dipraktikkan dalam bentuk nyata. Umat Hindu tidak canggung ikut bersama dalam perayaan umat Islam (Idul Fitri) dan bahkan Idul Kurban yang mengorbankan sapi (Wayan Sudiana, wawancara, 19/10/2015).

Para Penyuluh Dibutuhkan Untuk Menjaga Kerukunan

Secara statistik, umat Islam di Palu memang mayoritas tetapi isu kerukunan tetap menjadi isu yang penting. Posisi penyuluh dalam konteks ini menjadi sangat penting. Penyuluh tidak bisa melepaskan diri dari kenyataan bahwa wacana kerukunan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Palu. Khususnya di Palu Selatan dan (sebagian) Palu Timur. Di wilayah ini, bisa dikatakan wilayah ini merupakan basis umat Kristiani di Palu. Pertanyaan seputar relasi antar identitas sangat mudah ditemukan dalam majelis taklim. Perhatikan wawancara berikut:

Yang terjadi kalau saya di majelis taklim, ibu-ibu sering lepas bertanya kadang-kadang lain tema lain yang ditanyakan. Sudah ada silabus, tetapi kadang-kadang ada pertanyaan di luar silabus. Jadi kita harus siap? Biasanya ada pertanyaan begini, orang disebelah kita itu begini (*jari dibentuk seperti palang, sebagai simbol umat kristen*) mereka itu jorok, ada anjingnya, atau bisakah kita pinjamkan kursi kalau mereka ibadah, apakah kita harus hadir kalau mereka natalan dan bermacam-macam yang mereka sampaikan. Nikah beda agama? Bagaimana caranya menyikapi? Saya jawab, hidupan kita harus toleran. Kalau secara manusia kita silahkan, kecuali soal ibadah tidak bisa. Kalau untuk hubungan sesama manusia tidak ada masalah. Ibu kalau bertetangga dengan non muslim, bilang saja kami ini diharamkan makan Babi, dan Anjing. Kalau ada piring yang dijilat Anjing, najis bagi kami. Sampaikan saja begitu kenapa tidak? Masyarakat non muslim paham pasti. Kita harus saling terbuka, tidak usah saling tertutup (Harnia-Ketua Pokjalah Kota Palu, wawancara, 23/10/2015).

Pengalaman penyuluh diatas menunjukkan hal yang sangat penting. Masyarakat memahami posisi penyuluh sama dengan tokoh agama (ulama dan penceramah). Seorang penyuluh agama adalah seseorang yang ‘memahami’ agama. Penyuluh menjadi tempat bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Pengetahuan, perspektif,

dan ideologi seorang penyuluh agama menjadi sangat penting. Pada kasus diatas, terlihat bahwa si penyuluh memiliki ideologi kerukunan yang cukup baik. Sang penyuluh mengarahkan jamaah pada isu toleransi dengan mengedepankan proses dialog. Keterbukaan antara pemeluk agama menjadi kata kunci dalam merajut hubungan antar umat beragama.

Proses ini diakui oleh penyuluh terjadi secara spontan, di luar desain. Silabus majelis taklim yang disusun di Kementerian Agama RI (pusat) sebenarnya tidak memberi ruang kepada tema kerukunan secara spesifik. Tema yang ada bersifat ajaran normatif dan berkaitan dengan ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, dan nikah/cerai. Tetapi, pertanyaan publik biasanya lebih bersifat alami. Apa yang dirasakan, dialami, dan membutuhkan jawaban legitimasi dari agama pasti ditanyakan. Pola penyuluhan dialogis memang membuka ruang yang sangat lebar bagi munculnya pertanyaan-pertanyaan di luar tema.

Sistem ini sebenarnya agak riskan bagi penyuluh. Kompetensi penyuluh dipertaruhkan. Jawaban penyuluh bisa menjadi *guide* bagi jamaah untuk bertindak. Jawaban penyuluh yang out of context bisa menjadi bumerang bagi profesinya sebagai penyuluh dan juga bisa berbahaya bagi hubungan sosial. Jawaban penyuluh di atas sebenarnya merefleksikan wacana kerukunan yang paling *safety* di Indonesia. Kerukunan diarahkan pada level sosial dan dihindarkan dari level teologis. Hal ini tentu membantu bagi anggota majelis taklim dalam membangun relasi sosial dengan kelompok agama yang berbeda.

Hasil wawancara di atas-pun menunjukkan betapa para penyuluh dibutuhkan dalam berbagai hal termasuk isu kerukunan. Silabus penyuluh yang “mengabaikan” wacana kerukunan menjadi patut dipertanyakan mengingat Islam memiliki tiga nilai utama, hubungan kepada Allah, sesama manusia, dan kepada alam semesta. Pengabaian terhadap wacana kerukunan mengindikasikan betapa tugas kepenyuluhan dibentuk dalam sistem yang a-histori dan a-sosial. Kebutuhan masyarakat terhadap realitas agama sangat beragam, tidak seragam. Problematika yang dihadapi oleh masyarakat sangat bermacam-macam tergantung situasi sosial yang terjadi di sekitar mereka. Di Palu, para penyuluh yang “bekerja” di Palu Selatan sangat sering mendapatkan pertanyaan seputar hubungan antar umat beragama (salah satu contohnya kasus di atas). Sedangkan penyuluh di Palu Barat, Timur, dan Utara sangat

jarang mendapatkan pertanyaan tentang hubungan antar umat beragama. Wilayah ini mayoritas dihuni umat Islam. Sangat sedikit umat non-muslim. Dengan situasi sosial seperti ini, pertanyaan tentang relasi tidak menjadi memori publik.

Walau begitu, para penyuluh sesekali pun tidak terhindar dari pertanyaan seputar relasi. Perhatikan wawancara berikut:

Kadang-kadang ada juga yang bertanya misalnya bagaimana hukumnya mengucapkan selamat natal. Biasanya menjelang natal. Apalagi waktu keluar fatwa MUI tahun berapa itu? Ada yang bertanya. Saya jawab, kalau saya mengucapkan natal itu kan tidak merusak ibadah. Kita hanya mengucapkan selamat mereka merayakan hari besar. Sama kalau mereka mengucapkan hari raya untuk kita. Tapi kalau ada jamaah merasa itu sudah masuk ibadah, ya jangan diucapkan (Zulfiah, wawancara, 18/10/2015).

Penyuluh ini beroperasi di wilayah Palu Timur. Wilayah yang dianggapnya sebagai wilayah mayoritas muslim dengan jumlah mutlak. Pun kadang-kadang mendapatkan pertanyaan seputar relasi, khususnya menjelang hari natal. Pertanyaan tentang natal bagi umat Islam adalah pertanyaan nasional. Seorang muslim yang tidak memiliki pengalaman interaksi dengan penganut agama lain pun turut mempertanyakan. Ini karena pada tahun 2006, MUI pusat mengeluarkan fatwa larangan mengucapkan selamat natal. Tak pelak, pertanyaan publik tentang hukum dan keabsahan fatwa MUI tersebut disampaikan di forum bersama dengan penyuluh (dan dai tentu saja). Si penyuluh merasakan bahwa kegelisahan warga tentang agama tidak hanya bersumber dari pengalaman sehari-hari tetapi juga pergulatannya dengan wacana nasional. Isu yang diperbincangkan oleh media nasional menjadi konsumsi publik, seperti kasus ucapan selamat Natal.

Seorang penyuluh harus selalu siap sedia dengan berbagai pertanyaan kejutan di luar tema. Kesiap-sediaan seorang penyuluh terkait dengan kompetensi dan perspektifnya. Memang, riset ini tidak mendalami secara khusus kompetensi para penyuluh. Tetapi dari kesaksian Pembimas Islam Kemenag Kota Palu menunjukkan bahwa sembilan orang penyuluh agama Islam (PNS) yang ada di kota Palu memiliki kompetensi yang cukup mumpuni. Mereka tidak hanya bekerja secara formal sebagai penyuluh agama tetapi juga aktivis organisasi. Ada ketua Fatayat NU, aktivis Muhammadiyah, DDI, dan tokoh Al-khaerat. Keterlibatan mereka

sebagai anggota FKUB (periode 2006-2013) ikut memperkuat kompetensinya.

Bagaimana dengan perspektifnya? Dari dua jawaban kerukunan yang dilontarkan oleh dua penyuluh di atas, menunjukkan bahwa perspektif kerukunan yang dimiliki oleh kedua penyuluh di atas berada pada tataran inklusivisme atau toleransi pasif. Keduanya memberi garis batas teologis sebagai batas akhir yang tidak boleh dilewati dalam konteks relasi antar umat beragama. Batas agama tidak boleh dilanggar. Berhubungan secara sosial asalkan tidak melampaui batas 'agama'. Pilihan ini yang paling memungkinkan untuk diberikan sebagai jawaban karena seperti itu model kerukunan yang paling bisa dilakukan di Indonesia secara umum.

Isu teologis menjadi sangat sensitif di wilayah sosial. Pembangunan rumah ibadah sebagai contoh. Kasus rumah ibadah mendorong kelompok eksklusif menjadi lebih besar ketimbang kelompok inklusif. Bahkan seorang penyuluh agama yang menjadi anggota FKUB memilih untuk menghalangi pembangunan gereja ketimbang memberi ruang. Penghalangan gereja ini tidaklah merepresentasi perspektif kerukunan sang penyuluh tetapi sebagai bentuk tanggungjawab terhadap perspektif kerukunan yang dipahami publik. Kehadiran gereja di tengah kaum Islam tidaklah mudah. Peluang penolakannya sangat besar. Tidak mudah bagi seorang tokoh Islam untuk keluar dari narasi menguntungkan publiknya sendiri. Tidak mudah pula bagi seorang penyuluh untuk keluar dari cara pandang mayoritas publik. Sehingga sangat dimaklumi, jika berkaitan dengan hubungan antar umat beragama, si penyuluh selalu memberi batasan teologis sebagai batasan terakhir yang tidak boleh dilanggar.

Kebutuhan terhadap fungsi penyuluh semakin terlihat ketika seorang penyuluh agama Islam (Hader) ditugaskan untuk membuat pidato bersama tentang Islam sebagai agama perdamaian yang disampaikan di hari Jumat atas permintaan walikota pada tahun 2011. Permintaan pidato ini adalah respon terhadap situasi perkelahian antar warga di Desa Nunu dan Tavanjuka serta Kelurahan Lere-Kelurahan Baru. Pemerintah daerah melihat bahwa agama bisa menjadi bahasa yang fungsional untuk memberi kesadaran terhadap warga tentang perlunya menjaga perdamaian (Hader, wawancara, 22/10/2015).

Pun ketika seorang penyuluh (Agustan) diminta oleh seorang warga untuk memfasilitasi kasus nikah beda agama yang dialami puterinya. Orang tua yang beragama Islam merasa tertipu atas

perilaku seorang lelaki yang "pura-pura" masuk Islam lalu kembali ke agamanya ketika sudah menikah. Penyuluh agama ditugaskan menjadi fasilitator untuk menengahi kesalah-pahaman warga (Agustan, wawancara, 22/10/2015).

Dalam konteks hubungan internal, para penyuluh pun dibutuhkan kehadirannya. Pada tahun 2011, sekelompok pemuda melakukan intimidasi dan penyerangan terhadap warga Ahmadiyah. Kementerian agama Kota Palu menugaskan penyuluh untuk melakukan investigasi terhadap kasus itu. Setidaknya memberi gambaran kepada kementerian agama tentang posisi Ahmadiyah di Palu (Hader, wawancara, 22/10/2015).

Berbeda dengan penyuluh muslim, penyuluh Hindu dan Kristen tampaknya lebih *aware* terhadap isu kerukunan. Mereka menyadari penuh bahwa kerukunan menjadi kebutuhan bagi umat mereka. Sebagai umat dengan jumlah penduduk yang sedikit, peluang relasi dengan umat mayoritas (Islam) sangat besar terjadi. Tidak ada tempat di Kota Palu yang bisa diidentikkan secara khusus dengan Hindu atau Kristen. Di Palu Selatan memang banyak gereja dan umat Kristiani tetapi tidak berarti jumlahnya mengalahkan penduduk muslim. Apalagi umat Hindu. Pemukiman warga Hindu berpencar dan tidak terfokus pada satu titik pemukiman saja. Jumlah warga Hindu sekitar 3.000 dengan jumlah kk sebanyak 350 kk dengan 5 banjar. Dengan pola seperti ini, tingkat hubungan antar umat Islam-Kristen dan Islam-Hindu akan mudah terjadi. Penyuluh agama Kristen dan Hindu memasukkan tema kerukunan dalam silabus pengajaran mereka. Kedua-nya menyadari dengan baik bahwa tema kerukunan secara internal termuat dalam ajaran agama mereka dan secara sosial sangat dibutuhkan.

Perhatikan hasil wawancara berikut ini:

Kerukunan masuk dalam tema silabus kami (penyuluh Hindu). Kalau kita di kota ini malah itu menjadi target utama kita. Bagaimana konsep-konsep kerukunan kita muat. Bukan hanya menanamkan konsep spiritualnya saja tetapi juga soal hubungan dengan umat lain seperti konsep *tat wam asi* (kamu adalah aku), *tri hita kirane* (tiga pola hubungan), berfikir yang baik, berkata-kata yang baik. Harus kita bangun itu. Misalnya kami hidup di tengah orang Kaili, mau belajar bahasa mereka secara sembarangan nanti kami salah dan membuat orang tersinggung. Jadi kami bersama tokoh agama Hindu lainnya mengajak untuk belajar kata-kata yang baik. Kami sadar untuk hidup di kota bukan hanya spritual yang dibangun tetapi juga

sosial. Contoh kami ada mimbar di TVRI setiap sebulan sekali. Kami sadar bahwa yang menonton TVRI bukan hanya warga Hindu jadi kami juga memasukkan materi yang memuat hubungan sosial sehingga orang non-Hindu juga mengetahui ajaran-ajaran kami yang damai (Wayan Sudiana, wawancara, 19/10/2015).

Tampak dengan jelas dari hasil wawancara di atas bahwa posisi sebagai kelompok kecil atau minoritas dari sisi jumlah memberi kesadaran kepada penyuluh terhadap perlunya kerukunan disebarkan kepada umatnya. Kegagalan membangun diri sebagai kelompok minoritas yang arif bisa menyebabkan terjadinya distorsi sosial. Kasus guru Kristen di SMK di atas adalah contoh yang baik dari kegagalan seseorang dari kelompok minoritas memosisikan diri. Sebagai kelompok kecil, penyuluh ini menyadari dengan baik perlunya meredam segala potensi konflik yang merugikan diri mereka sendiri nantinya. Ini juga diperkuat dengan ajaran utama dari agama Hindu yang memang sangat menyokong terjadinya hidup yang harmonis. Filosofi *tat wam asi* (kamu adalah aku) memiliki nilai penting dalam membangun keharmonisan. Umat Hindu di Indonesia –sejauh ini- memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dengan situasi sosial tempat mereka berada.

Hal serupa dialami oleh penyuluh Kristen, bahkan dengan situasi yang lebih kompleks. Penyuluh agama Kristen diperhadapkan pada dua situasi, hubungan antar Kristen-non Kristen dan hubungan internal umat Kristen. Perkembangan kelompok Kristen (khususnya dari denominasi Karismatik) cukup pesat di Palu. Kehadiran kelompok ini pasti membutuhkan bangunan rumah ibadah. Perhatikan wawancara berikut:

Hubungan antar denominasi relatif, sama saja di seluruh wilayah. Cuma ada satu kesyukuran kami disini. Melalui Kementerian Agama kota Palu membuat satu persekutuan namanya persekutuan gereja-gereja diaspora. Semua denominasi yang belum punya rumah ibadah tetap atau belum punya ijin membangun dikumpulkan. Saat ini sekitar ada 30 anggota. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Sejenis Oikumene, tetapi kita spesifik ke komunitas atau denominasi yang belum punya (bangunan) gereja. Masih beribadah di rumah, di hotel, di sekolah. Disini kita mau menyatukan pemahaman Oikumene. Fungsinya, jangan sampai mereka saling bertabrakan di lapangan. Kita juga menciptakan diskusi. Misalnya satu keluar IMB-nya. Caranya apa? Trik-triknya bagaimana? Mereka harus

tahu kalau mau bangun gereja aturannya begini. Kita tidak mau mereka memahami bahwa kalau mau mendirikan gereja tidak perlu pemerintah (Oksantianus, wawancara, 15/10/2015).

Kompleksitas persoalan denominasi dalam agama Kristen memang membutuhkan tindakan pencegahan yang *smart*. Kehadiran denominasi yang tertutup tidak hanya berpengaruh dalam konteks hubungan internal umat Kristen tetapi juga dengan umat lain (terutama umat Islam). Kasus guru Karismatik di SMK di atas menjadi contoh. Tindakan pembentukan persekutuan gereja diaspora adalah tindakan yang benar. Persekutuan berbagai denominasi dalam satu persekutuan bisa membangun komunikasi internal yang selama ini terkenal kaku. Selain itu, tindakan ini bisa membantu proses hubungan antar umat beragama terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah.

Kompleksitas hubungan, baik internal maupun eksternal, menyebabkan isu kerukunan menjadi sangat penting disosialisasikan dalam masyarakat Kristen. Hal itu disadari benar oleh sang penyuluh. Dia menggunakan dua pendekatan dalam konteks ini. Pertama, memasukkan wacana kerukunan sebagai bagian dari materi ajar. Salah satu materi yang tertera dalam laporan penyuluh tahun 2013 adalah *menolong sesama tanpa melihat latar belakang dan suku*. Materi ini mengeksplorasi kitab injil Lukas yang berbicara tentang menolong sesama. Kedua, model spontan. Polanya relatif sama dengan pola penyuluh agama Islam yang telah dijelaskan di atas. Yaitu, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar relasi yang diajukan oleh kelompok bimbingan.

Yang lebih menarik adalah pengalaman penyuluh Kristen. Dia memprakarsai berdirinya paduan suara kerukunan yang merekrut anggota dari semua agama yang ada. Paduan Suara ini dibuat pada tahun 2013, sebagai bagian artistik penyelenggaraan pertemuan antar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama regional kawasan Timur Indonesia. Paduan suara yang beranggotakan berbagai “identitas” agama itu tidak hanya berfungsi sebagai penyokong sebuah even secara artifisial tetapi juga mengartikulasikan arti hidup bersama secara nyata. Pada saat latihan, menjelang azan magrib, segala aktivitas latihan dihentikan dan memberi kesempatan kepada anggota yang beragama Islam untuk salat Magrib. Mereka juga bersama membentuk harmoni dalam alunan musik yang indah. Musik, bagi penyuluh agama Kristen ini adalah artikulasi yang paling tepat dalam merefleksikan kerukunan secara nyata.

Temuan riset di atas mengkonfirmasi asumsi awal dari riset ini, bahwa penyuluh tidak terlalu spesifik terlibat dalam isu kerukunan. Isu kerukunan hanya menjadi isu pinggir dari kerja penyuluh di lapangan. Kalaupun ada *benang merah* dengan kerukunan, itu karena keterlibatan para penyuluh secara personal dengan isu kerukunan (bagi penyuluh Islam) dan karena adanya bias minoritas. Para penyuluh selama ini lebih banyak memusatkan perhatian pada isu keagamaan secara formal. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh mekanisme kerja yang di-*drive* dari pusat. Silabus yang menjadi pedoman kerja penyuluh disusun dari pusat (Dirjen Bimas Islam untuk penyuluh beragama Islam). Tema utama yang diamanatkan kepada penyuluh untuk diajarkan kepada publik (dampingan) adalah wacana dasar keagamaan seperti salat, zakat, pernikahan, wakaf, dan keluarga sakinah.

Ketiadaan isu kerukunan dalam bahan ajar para penyuluh adalah hal yang sangat aneh. Mengingat kerukunan adalah bagian penting dalam ajaran agama. Setiap agama mengandung ajaran sosial yang mengatur relasi antar umat manusia. Hubungan antar identitas bahkan menjadi ajaran dasar dalam Islam. Trias relasi (Tuhan, manusia, dan alam) yang dikenal sebagai basis epistemologi Islam adalah refleksi dari kandungan ajaran agama yang komprehensif itu. Bahkan, trias relasi ini menjadi fondasi semua ajaran agama di Indonesia. Tema kepenyuluhan tampaknya lebih banyak diarahkan ke isu relasi Ketuhanan belaka.

Ketiadaan isu kerukunan dalam bimbingan kepenyuluhan merefleksikan posisi negara yang sangat teknis melihat isu kerukunan. Urusan kerukunan diserahkan sepenuhnya kepada PKUB (Pusat Kerukunan Umat Beragama) dan (juga) FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). FKUB sejatinya adalah forum masyarakat tetapi dibentuk oleh negara melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006. Kedua lembaga ini adalah lembaga teknis yang bekerja lebih bersifat preventif (pencegahan) bahkan lebih banyak diorientasikan pada soal pembangunan rumah ibadah.

Paradigma teknikal ini menyebabkan fungsi kepenyuluhan tidak berjalan optimal di lapangan. Fungsi kepenyuluhan sejatinya telah dilakukan secara swadaya oleh lembaga keagamaan. Pesantren Al-Khaerat, NU, Muhammadiyah dan lembaga keagamaan lainnya secara intensif telah melakukan pendampingan, bimbingan, dan penyuluhan agama di masyarakat. Demikian pula, para pendeta di gereja

telah secara intensif melakukan tugas kepenyuluhan agama.

Kesan itu terlihat ketika peneliti bertemu dengan salah seorang tokoh masyarakat. Sang tokoh (nama dirahasiakan) menganggap peran penyuluh tidak kelihatan dalam masyarakat. Yang dimaksud adalah frekuensi dan domain. Penyuluh agama dalam perspektif warga dibedakan secara teknis dengan kyai, dai, dan muballigh. Penyuluh agama adalah term struktural dan formal, berasal dari negara sedangkan kyai, dai, muballigh adalah term kultural, berasal dari masyarakat. Warga cenderung kurang menyadari kalau sebagian besar, kalau tidak ingin mengatakan seluruhnya, telah 'dipenyuluhkan'. Tokoh populer seperti Said Saggaf Al-Jufri (pimpinan Al-Khaerat) dan Khadijah Toana (tokoh senior Muhammadiyah) masuk dalam daftar penyuluh non-PNS. Bagi warga, kedua orang ini adalah pimpinan agama (dalam arti kultural) bukan penyuluh agama (dalam arti struktural).

Artinya, dalam konfigurasi peta perdakwaan, para penyuluh agama tidak memiliki posisi yang signifikan. Jumlah yang kurang (hanya 9 orang penyuluh Islam, 1 orang penyuluh Kristen dan Hindu) menyebabkan daya jangkauan yang rendah. Ini kemudian berimplikasi pada popularitas penyuluh yang juga rendah di masyarakat. Sekali lagi yang dimaksud disini adalah penyuluh PNS. Apalagi, model kerja para penyuluh tidak berbasis pada isu masyarakat tetapi berbasis pada program pusat. Silabus yang digunakan para penyuluh merupakan produk dari pusat (Bimas Islam).

Padaahal, kerukunan adalah kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum. Tantangan intoleransi baik dalam bentuk yang laten maupun manifest semakin menguat belakangan ini. Percepatan perpindahan gagasan melalui internet dan smartphone menyebabkan konfigurasi sosial berubah lebih cepat. Sebagai contoh, kasus pembunuhan seorang petani di Poso pada bulan September tahun 2014 yang lalu. Kronologi pembunuhan dan alasan-alasan kenapa sang petani dibunuh sudah bisa ditemukan di dunia maya. Berdasarkan pelacakan pihak kepolisian, informasi di internet tersebut diunduh di Jakarta. Ini menunjukkan betapa jaringan kelompok militan dan radikal sangat mudah menemukan momentum melalui jaringan internet (Hamzah dan Saprillah, 2014).

Kehadiran kelompok-kelompok militan khususnya di Poso adalah bom waktu yang siap meledakkan situasi sosial di Sulawesi Tengah.

Penjelasannya begini, negara menjadi titik puncak piramid dalam sistem demokrasi. Segala opini, keinginan, pendapat, aspirasi dari warga dikelola secara bersama antara warga dan negara. Tetapi, ketidakmampuan negara mengelola berbagai kepentingan dengan mudah memunculkan sensitifitas di kalangan warga. Misalnya, tahun 2000-an muncul gejala milisi sipil di Sulawesi Selatan yang menghakimi segala bentuk pencurian dan kriminalitas secara massif. Warga merasa memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman.

Ketika pihak kepolisian sebagai representasi negara dianggap tidak bisa memberi rasa aman, warga bertindak mewakili "kerja polisi" dengan menghakimi para pelaku secara massa. Gejala ini pula yang menjadi alasan di balik munculnya organisasi FPI (Forum Pembela Islam) di berbagai daerah di Indonesia (termasuk di Palu). Maka, negara harus tampil seadil mungkin terhadap berbagai kepentingan. Kehadiran milisi sipil yang masih bergerak *under ground* di Sulawesi Tengah, suatu saat, bisa menjadi pelarian bagi warga muslim yang merasa hak-haknya sebagai umat Islam tidak dipenuhi oleh negara. Perjuangan berbasis keagamaan bisa sangat mudah memunculkan semangat patriotisme dan tentu saja mengganggu situasi kerukunan yang menjadi proyek bersama sebagai bangsa Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan temuan dan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa situasi kerukunan antar umat beragama di Kota Palu berada dalam situasi yang baik. Patron sosial dari ormas agama dan FKUB Kota Palu bekerja dengan baik dalam meredam kemungkinan terjadinya gejolak sosial akibat dari *sindrom* Poso atau pun dalam kasus pendirian rumah ibadah. Para penyuluh agama (khususnya penyuluh PNS) memiliki perspektif kerukunan yang relatif baik. Ini ditunjang oleh pengalaman sebagian besar penyuluh sebagai anggota FKUB dan latar belakang organisasi keagamaannya. Tidak ada satupun penyuluh yang berlatar belakang organisasi agama yang mendorong terjadinya intoleransi.

Keterlibatan penyuluh dalam konteks kerukunan terbagi pada tiga pola. *Pertama*, keterlibatan langsung. Antara lain sebagai anggota FKUB, membentuk komunitas kerukunan (grup musik), memfasilitasi kasus pernikahan beda agama. *Kedua*, formalis. Dengan memasukkan tema kerukunan dalam materi ajar bimbingan

dan kepenyuluhan. *Ketiga*, model spontan. Secara umum dapat dikatakan peran penyuluh agama dalam konteks kerukunan masih sangat sedikit. Ini disebabkan oleh setidaknya dua faktor. *Pertama*, sistem kepenyuluhan tidak berbasis pada isu spesifik. Materi ajar lebih umum diarahkan pada soal ajaran dasar agama yang bersifat internal. Kerukunan dianggap bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) penyuluh. *Kedua*, tidak adanya peta dakwah yang jelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan terima kasih kepada para informan terutama Kepala KUA Kementerian Agama Palu beserta para penyuluh dan stafnya. Kepada para pelopor kerukunan di Palu. Terima kasih pula kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang telah mensponsori kegiatan penelitian ini, kepada redaksi jurnal Al-Qalam yang telah memuat tulisan ini. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada bapak/ibu, sahabat-sahabat, dan lembaga terkait yang telah membantu peneliti selama di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depag RI. 2003. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya* (tidak diterbitkan).
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2000. *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*.
- Eck, Diana L. 2003. *Encountering God: A Spiritual Journey from Bozeman to Benaras*. MA: Beacon Press.
- Effendi, Bachtiar. 2000. *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina.
- Hamzah dan Saprillah. 2014. *Respon Publik Terhadap Radikalisme di Palu dan Makassar*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Harahap, Syahrin. 2011. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada Media.
- Ismail, Faisal. 2012. *Republik Bhineka Tunggal Ika; Mengurai Isu-isu Konflik, Multikulturalisme, Agama, dan Sosial Budaya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Metro Sulawesi, Tanggal 22 Juli 2015.

- Mizrawi, Suhairi. 2007. *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Jakarta Fitrah: Publishing.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2008. *Optimalisasi Pelayanan Keagamaan Departemen Agama*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2010. *Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Sulawesi Selatan*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2010. *Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam di Kawasan Timur Indonesia*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2011. *Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Kalimantan Timur*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2012. *Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Sulawesi Utara*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2013. *Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Gorontalo dan Sulawesi Barat*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2014. *Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Sulawesi Tenggara*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Walzer, Michael. 1997. *On Toleration*. Yale University Press: New Haven and London.